

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus Kepemilikan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Usaha Rumah
Makan Di Kecamatan Pontianak Selatan**

Oleh :

Inneke Putri ^{1*}

NIM: E1011151104

Drs. Sukamto, M.Si ^{2*}, Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si ^{2*}

*Email : e1011151104@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Pontianak Selatan. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Peneliti menggunakan Teori George Edward III ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu a).Komunikasi; menunjukkan bahwa kelompok sasaran belum memahami secara jelas tentang pentingnya pembuatan IPAL, b).Sumberdaya; ketidak sinkronan jumlah staf yang ada dengan jumlah pelaku usaha yang meningkat pesat membuat implementor tidak bias menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian secara optimal, c).Disposisi; sikap pelaku usaha rumah makan cenderung belum menaati peraturan yang ada, d). Birokrasi; masing-masing jabatan atau staf memiliki SOP sehingga dalam aturan pelaksanaan tugas pun sudah ada aturan untuk memudahkan para implementor menjalankan tugas pokok fungsi yang diamanatkan. Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyampaikan seluruh informasi se jelas- jelasnya kepada pelaku usaha rumah makan baik dari segi pengawasan dan dan pembinaan memberikan informasi melalui sosialisasi, dan media online agar kebijakan tentang pengendalian pencemaran air khususnya tentang kepemilikan IPAL dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengendalian Pencemaran Air, Pelaku Usaha Rumah Makan.

Implementation Of Pontianak City Regional Regulation Number 5 Of 2013

Concerning Control Of Water Pollution Ownership Case Study

***Wastewater Treatment Plant (WWTP) In Home Business
Eat In South Pontianak District***

By :

Inneke Putri ^{1*}

NIM: E1011151104

Drs. Sukamto, M.Si ^{2*}, Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si ^{2*}

*Email : e1011151104@student.untan.ac.id

1. *Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura.*

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of the Regional Regulation of Pontianak City Number 5 of 2013 concerning Water Pollution Control. The researcher used qualitative research with exploratory research type. Researchers using the theory of George Edward III there are 4 variables that affect the successful implementation of a policy, namely a). Communication; shows that the target group has not clearly understood the importance of making WWTPs, b). Resource; the unsynchronization of the number of existing staff with the rapidly increasing number of business actors makes implementors unable to carry out their supervisory and control duties optimally, c). Disposition; the attitude of restaurant business actors tends to not obey existing regulations, d). Bureaucracy; each position or staff has an SOP so that in the rules for implementing tasks there are already rules to make it easier for implementers to carry out the main tasks of the mandated functions. The recommendation that the author can convey is that the Pontianak City Environmental Service conveys all information as clearly as possible to restaurant business actors both in terms of supervision and and guidance, providing information through socialization, and online media so that policies on controlling water pollution, especially regarding WWTP ownership, can work optimally.

Keywords: Policy, Water Pollution Control, Restaurant Business Actors.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Pontianak Selatan.*” Judul ini dipilih karena melihat fakta dilapangan bahwa kurangnya jumlah staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengakibatkan tidak optimalnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air khususnya pada Pemilik instalasi pengolahan air limbah di lingkungan usaha rumah makan yang ada di Pontianak Selatan, kurangnya staf pengawasan mengakibatkan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki (IPAL) Serta komunikasi yang di lakukan secara sosialisasi tidak berjalan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya staf dengan jumlah Pelaku usaha yang sangat tidak signifikan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum berjalan dengan optimal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi & menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif, dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai faktor-

faktor serta hubungan dengan fakta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Diharapkan analisis tersebut dapat mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya sehingga ditemukan pola-polanya sebagai wacana untuk perbaikan ke arah implementasi yang lebih efektif dan efisien.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153) ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1). Komunikasi, (2). Sumber daya, (3). Disposisi, (4). Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari komunikasikelompok sasaran (Pelaku usaha rumah makan) belum memahami secara jelas tentang pentingnya pembuatan IPAL, baik mengenai kebijakannya, dan aturan-aturan yang ada. Diilihat dari sumber daya, Sumberdaya staf dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengendalian pencemaran air terutama dalam status kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha belum memadai. Ketidak sinkronan jumlah staf yang ada dengan jumlah pelaku usaha yang meningkat pesat membuat implementor tidak bisa menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian secara optimal. Disposisi sikap pelaksana kebijakan atau implementor sudah cukup baik namun sikap pelaku usaha rumah makan cenderung belum menaati peraturan yang ada hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai pentingnya pembuatan IPAL bagi pelaku usaha dan mahalny biaya pembuatan IPAL membuat pelaku usaha keberatan dalam kebijakan pembuatan IPAL. Struktur Birokrasi berdasarkan peraturan walikota Nomor 61 Tahun 2016, Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pontianak untuk masing-masing jabatan atau staf yang ada memiliki SOP nya masing-masing sehingga dalam aturan pelaksanaan tugas pun sudah ada aturan untuk memudahkan para implementor menjalankan tugas pokok fungsi yang diamanatkan.

Saran dari penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyampaikan seluruh informasi se jelas-jelasnya kepada pelaku usaha rumah makan baik dari segi pengawasan dan pembinaan memberikan informasi melalui sosialisasi, dan media online agar kebijakan tentang pengendalian pencemaran air khususnya tentang kepemilikan IPAL dapat berjalan dengan optimal. Kurangnya sumber daya staf dalam pengawasan dapat dilakukan perekrutan tenaga lapangan dalam pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha agar implementasi kebijakan dapat di optimalkan. Disposisi atau sikap yang dilakukan oleh implementor dalam Pemberian sanksi kepada pelanggar yang tidak memiliki IPAL harus ditindak berdasarkan aturan yang ada dan hukuman yang berlaku secara tegas dan konsisten. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkala agar dapat memantau lebih jelas dengan perkembangan setiap pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL. Struktur Birokrasi yang dilakukan oleh implementor juga harus jelas sehingga dapat memudahkan pelaksana dan pelaku usaha dalam memahami suatu kebijakan dan tugas fungsi itu sendiri.